

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KANTOR DPRD PADANG PANJANG BERDASARKAN PSAP NO.01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023-2024

Yudhi Prayoga¹, Baginda Parsaulian²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Email: yudhiprayoga32@gmail.com¹, bagindaparsaulian@un.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Relevansi, ketergantungan, keterbandingan, dan pemahaman merupakan empat karakteristik kualitatif utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di DPRD Kota Padang Panjang, studi dokumentasi laporan keuangan daerah, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam PSAP No. 01, khususnya dalam hal kelengkapan unsur laporan dan keterbandingan antar periode. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh pengguna non-teknis, serta ketidaksesuaian dalam pengungkapan beberapa pos tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan berada pada kategori baik, peningkatan masih diperlukan dalam aspek keterbacaan dan konsistensi pengungkapan informasi. Diharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD akan menggunakan temuan ini sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Laporan Keuangan 2023 dan 2024, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Based on Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 01 about the Presentation of Financial Statements for the fiscal years 2023 and 2024, this study attempts to evaluate the quality of the financial reports produced by the Padang Panjang City Government. Relevance, dependability, comparability, and understandability are the four main qualitative traits used to evaluate the quality of financial reports. Using a qualitative descriptive approach, this study collected data through interviews with pertinent members of the Padang Panjang City Regional People's Representative Council (DPRD), audit results from the Supreme Audit Agency (BPK), and documentary analyses of regional financial reports. The results indicate that the Padang Panjang City Government's financial reports generally meet the basic principles stipulated in PSAP No. 01, particularly regarding the completeness of report elements and comparability between

periods. However, several weaknesses remain in presenting relevant and understandable information for non-technical users, as well as discrepancies in the disclosure of certain items. This study concludes that although the quality of the financial reports is considered good, improvements are still needed in terms of readability and consistency of information disclosure. It is anticipated that these results will contribute to the Regional Government and DPRD in efforts to increase transparency and accountability in regional financial manage.

Keywords: 2023 And 2024 Financial Report, Regional Government.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan reformasi di Indonesia memungkinkan perspektif baru dalam hal kewenangan untuk mengawasi keuangan pemerintah nasional dan daerah. Perubahan struktur tata kelola, khususnya pengelolaan keuangan, juga diakibatkan oleh pembagian sistem pengelolaan keuangan dan pertumbuhan pemekaran daerah baru. Para pengambil keputusan di pemerintahan kini memprioritaskan hal ini.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keduanya ditetapkan oleh pemerintah pusat mencapai hal ini. Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan menyusul pengesahan kedua undang-undang tersebut. Salah satu peraturan tersebut, yaitu Proses pencatatan, pengawasan, dan peringkasan dalam satuan moneter peristiwa dan transaksi yang bersifat keuangan umum, termasuk laporan mengenai realisasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilandasi otonomi dan tugas pembantuan dengan asas ekonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Pemerintahan.

Karena menyediakan ringkasan keuangan atas peristiwa dan transaksi, Pada dasarnya, laporan keuangan berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban bagi para eksekutif atau manajer perusahaan. Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk kebijakan dan pengambilan keputusan, di samping pihak eksternal Seperti bisnis, lembaga keuangan, investor, dan calon investor. Setiap orang yang menggunakan laporan keuangan memiliki beragam kepentingan. tergantung pada kebutuhan spesifik mereka.

Setidaknya setahun sekali, laporan keuangan dibuat dan disampaikan. Setiap negara memiliki seperangkat aturan akuntansinya sendiri sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan. Setelah melalui proses yang berlarut-larut, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005, semuanya mensyaratkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan.

Teori akuntansi menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Padang Panjang dikelola secara tidak adil pada tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) menilai hal itu terjadi karena masih adanya permasalahan dalam penyusunan dan penyajian sejumlah Laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) menjadi penyebabnya Pemerintah Kota Padang Panjang tidak mencerminkan secara akurat laporan keuangan pemerintah daerah integritasnya dipertanyakan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perlu ditinjau pada tahap perencanaan. Dalam rangka menjamin keseragaman akuntansi di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah (BUMD) di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus diberlakukan.

Berdasarkan kejadian tersebut, diduga bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu Pernyataan Persyaratan Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di kantor DPRD Padang Panjang Berdasarkan PSAP No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023-2024”**.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan informasi yang detail, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana laporan keuangan Pemerintah Daerah Padang Panjang tahun anggaran 2023–2024 dievaluasi kualitasnya sesuai dengan PSAP No. 01.

Karena terlibat langsung dalam pembuatan, penatausahaan, dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, Kepala Sub Bagian Umum Kantor DPRD Kota Padang Panjang dan pejabat Dinas Keuangan berperan sebagai informan utama penelitian ini. Sementara

pejabat di Dinas Keuangan memiliki wewenang dan pengetahuan mendalam tentang anggaran, alokasi dana, dan aturan akuntansi yang diterapkan saat membuat laporan keuangan, Kepala Subbagian Umum bertanggung jawab atas manajemen administrasi dan koordinasi umum yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan.

Analisis data deskriptif merupakan strategi digunakan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan metodologi analisis dimana informasi terkumpul dikategorikan atau diorganisasikan sebelum diperiksa dan diinterpretasikan secara objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang

Didirikan atas dasar gagasan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023–2024 dikumpulkan dan dibukukan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010, yang menunjukkan pengelolaan keuangan publik yang bijaksana. Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, organisasi pelaporan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, menetapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini. Selain itu, konsep pengelolaan keuangan yang bijaksana dalam lingkungan pemerintahan juga diterapkan dalam penyusunannya.

Penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran memberikan perbandingan menyeluruh antara anggaran dan aktualisasinya. Komponen pendapatan dan belanja LRA juga dicantumkan dalam laporan ini. untuk tahun pertama, Januari hingga 31 Desember 2023 dan 2024. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.299.390.567,00, realisasi belanja tahun anggaran 2023 adalah Rp40.794.003.353,00. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.209.390.117,00, realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah Rp50.104.203.353,00.

b. Neraca

Neraca menunjukkan aset, liabilitas, per 31 Desember 2023, dan ekuitas organisasi per 31 Desember 2024. Per 31 Desember 2023, total aset senilai Rp92.453.972.510,00, yang mencakup aset lancar sebesar Rp6.901.539,00, aset tetap sebesar Rp91.100.766.510,00, dan aset lain-lain (neto) sebesar Rp1.453.206.000,00. Nilai ekuitasnya adalah Rp92.553.972.510,00. Per 31 Desember 2024, total nilai aset adalah Rp94.445.548.622,00, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp10.871.111,00, aset tetap sebesar Rp93.044.938.854,00,

dan aset lain-lain sebesar Rp1.500.609.768,00. Nilai aset yang tercatat dan ditampilkan per 31 Desember 2024 adalah Rp94.445.548.622,00, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp10.871.111,00, aset tetap (neto) sebesar Rp93.044.938.854,00, dan aset lain-lain (neto) sebesar Rp1.500.609.768,00. Nilai ekuitas secara khusus adalah Rp94.545.548.622,00.

c. Laporan Operasional

Untuk memastikan penyajian yang wajar, Laporan Operasional mencakup sejumlah komponen, termasuk laba rugi (LO), biaya, surplus/defisit LO, surplus atau defisit sebelum dan sesudah pos-pos yang tidak biasa. Laba rugi (LO) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0 dan total beban adalah Rp 30.143.533.743,00, terdapat defisit sebesar Rp 30.143.533.743,00 dari aktivitas operasional. Hingga 31 Desember 2024, Defisit LO entitas adalah Rp 30.143.533.743,00, atau Rp 0. Defisit pos luar biasa adalah Rp 0,00, dan surplus aktivitas non-operasional adalah Rp 0,00. Total beban adalah Rp 31.165.648.814,00, yang mengakibatkan defisit dari aktivitas operasional sebesar Rp 31.165.648.814,00. Perusahaan mengalami Defisit-LO sebesar Rp 31.165.648.814,00 yang diakibatkan oleh defisit sebesar Rp 0,00 pada pos luar biasa dan surplus sebesar Rp 0,00 pada aktivitas non-operasional.

d. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal memberikan rincian spesifik tentang bagaimana ekuitas meningkat atau menurun selama tahun pelaporan dalam kaitannya dengan tahun sebelumnya. Ketika tahun 2023 pertama kali dimulai, ekuitas Rp 113.167.761.665,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 35.767.530.176,00. Modal organisasi per 31 Desember 2023 adalah Rp 51.465.841.157,00 setelah koreksi sebesar Rp 28.326.668.425,00, beserta Rp 0,00 dan Rp 28.326.668.425,00 dalam transaksi antar entitas. Pada tanggal 1 Januari 2024, ekuitas adalah Rp 92.553.972.510,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 37.165.648.814,00. Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 kemudian bernilai Rp 49.768.134.257,00 setelah koreksi sebesar Rp 32.628.961.525,00 dan penambahan sebesar Rp 32.628.961.525,00 dan Rp 0,00 untuk transaksi antar entitas.

e. Pencatatan Laporan Keuangan

Nilai pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dijelaskan, dicantumkan, dan dianalisis secara menyeluruh dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK mencakup informasi yang dibutuhkan dan disarankan oleh Standar Akuntansi Pemerintah, beserta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 disusun dan disajikan menggunakan kas. Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 dan 2024 disusun dan disajikan menggunakan metode akrual.

Evaluasi penulis terhadap perbedaan komponen laporan keuangan yang diidentifikasi oleh PSAP dan komponen Laporan Pencatatan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang

NO	Bentuk LK (Y)	Menurut PSAP	Penerapan di Pemerintah Kota Padang Panjang	KESES UAIAN-NYA (X)
1	Laporan Realisasi Anggaran	LRA me nyajikan sek urang kurang nya unsur-unsur sbb: -Pendapatan -Belanja -Transfer - Surplus/Defisit -Pembiayaan -Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Hanya menyajikan unsur Belanja saja	17

2	Neraca	Neraca mencantumkan pos-pos berikut: -Kas dan setara kas -Investasi jangka pendek -Piutang pajak dan bukan pajak -Persediaan -Investasi jk. panjang -Aset tetap -Kewajiban jk. pendek -Kewajiban jk. panjang -Ekuitas Dana	Pos-pos yang disajikan: -Kas dan setara kas -Investasi jangka pendek -Piutang pajak dan bukan pajak -Persediaan -Investasi jk. panjang -Aset tetap -Kewajiban jk. pendek -Kewajiban jk. panjang -Ekuitas Dana	100
3	Laporan Operasional	LO menyajikan pos-pos sbb: -Pendapatan -Beban berdasarkan klasifikasi fungsional -surplus atau defisit	Pos-pos yang disajikan: -Pendapatan dari kegiatan operasional -Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi -surplus atau deficit	100
4	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas menyajikan informasi	menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan	100

5	Laporan Perubahan Ekuitas	Menyajikan -Ekuitas awal -surplus/defisit- LO -Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi Ekuitas -Ekuitas akhir	Pos-pos yang disajikan: -Ekuitas awal -surplus/defisit- LO -Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi Ekuitas -Ekuitas akhir	100
6	Catatan Atas Laporan Keuangan	CaLK disajikan secara sistematis . setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas harus mempunyai referensi silang terkait dengan informasi dalam CaLK	CaLK disajikan secara sistematis . setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas harus mempunyai referensi silang terkait dengan informasi dalam CaLK	100

$$X=517$$

Keterangan	Perhitungan
SS (Sangat sesuai) = 80-100 S (Sesuai) = 50-80 CS (Cukup sesuai) = 10-50	Rata-rata = $\sum X/Y$ = $517/6 = 86$ Jadi Kesesuaiannya = 86%

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang analisis Secara umum laporan keuangan Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Panjang tahun anggaran 2023–2024 telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, sesuai dengan kualitas laporan. Mayoritas ciri kualitatif keandalan, keterbandingan, pemahaman, dan relevansi dipenuhi oleh laporan keuangan. Namun demikian, prinsip keandalan masih sulit diterapkan, terutama dalam hal ketepatan waktu penyajian laporan dan keakuratan informasi dalam sejumlah item laporan.

Kualitas penyajian laporan keuangan juga dipengaruhi oleh keterbatasan teknis, seperti kurangnya sumber daya manusia akuntansi dan pengetahuan tentang standar akuntansi. Oleh karena itu, meskipun Kerangka PSAP No. 01 telah diikuti saat membuat laporan keuangan. pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik serta terus meningkatkan kualitas pengungkapan keuangan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.26, No.2, 1 2021, h.149 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan," Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, no. 71 (2010): 160-73
- Nordiwana, D., Iswahyudi, S. P., dan Maulidah, R. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 24
- Nunuy Nur Afifah, Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP Glynn, J J. Public Sector Financial Control and Accounting. 2nd Ed,(Oxford: Blackwell.1993),h. 15.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015), h.25
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, "Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01", (Jakarta : Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2021), h.38
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP La Mijan ,Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta:Salemba Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Ridho Syukro, <http://www.beritasatu.com>. Diunduh pada tanggal 25 Januari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.